

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Angger Wijaya, dkk. Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokratis, Pustaka Pelajar berkerjasama dengan Yopika dan Forum LSM DIY, 2020.

_____. Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokratis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

HAW. Widjaja. Otonomi Desa, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Kartini Karto Nomor Pengantar Metodologi Research, Alumni, Bandung, 2013.

Mohamad Ali. Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi, Angkasa, Bandung, 2014.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

_____. Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 2013.

Sri Mamuji. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2015.

Suharsini Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Titik Triwulan Tutik. Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2016.

Internet

Admin. Akuntabilitas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas>, diakses 24 Februari 2020.

Rahmat Junaidi, "Arti Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/arti-pertanggungjawaban-keuangan-desa-bagi-aparat-desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa> diakses pada tanggal 14 Juli 2023.

Jurnal

- A. A Gede Putra Indranata Dharma dan I Wayan Parsa, "Pelaksanaan Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Kemenuh", Jurnal Kertha Negara, Vol. 7, Nomor 10, 2019.
- Adianto Asdi Sangki, et all, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)", Jurnal Eksekutif, Vol. 1, Nomor 1, 2017.
- Adi Fauzanto, "Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif", Jurnal Hukum Widya Yuridika, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Afrik Efendi, "Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember", Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember, 2016
- H.A. Komari, "Implikasi Penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, Nomor 1, 2009.
- Hendi Sandi Putra, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri", Jurnal Politik Muda, Vol. 6, Nomor 2, 2017.
- Ichsan Ramadhan, Sulistyowati dan Kristiyanto, "Kedudukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance", Jurnal Suara Keadilan, Vol. 20, Nomor 1, 2019.
- Muhamad Azam Mustangin dan Utpala Rani, "Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang", (Jurnal Mutiara Madani, Volume 8 Nomor 2, 2020.

Mochammad Nur Hadi Saputro, "Penerapan Transparansi Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)", (Jurnal Dinamika Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 13, Agustus 2020).

Saharuddin, "Analisis Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng", Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 10, Nomor 2, Juli 2019.

Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami, "Implementasi Good Governance Dengan Dasar Uu Nomor32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta" Seminar Nasional Dan Call For Papers Uniba, 2014.

Yunianingrum Dan Lala M. Kolopaking, "Kemampuan Aparat Pemerintah Desa Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa", Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat, Vol. 2 Nomor 4, 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.